

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesejahteraan atau *Welfare State* menjadi sebuah konsep yang dianggap tepat untuk melihat sejauh mana peran negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Negara Indonesia sendiri berupaya mewujudkan konsep *Welfare State* ini karena sesuai dengan salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Konsep kesejahteraan ini didalam perkembangan demokrasi sekalipun sangat tidak bisa dipisahkan. Kesejahteraan harus berjalan beiringan dengan demokrasi, artinya suatu negara belum bisa dikatakan menerapkan demokrasi jika masyarakatnya belum sejahtera, begitupun sebaliknya, masyarakat tidak akan sejahtera tanpa adanya demokrasi.

Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang baik. Artinya segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Lebih lanjut mengenai kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan ekonomi, diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya tercantum dasar dari demokrasi Ekonomi di Indonesia, dimana Negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Dengan demikian, seluruh warganegara yang berada dibawah naungan Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan itu.

Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm.17) menyatakan bahwa Pemerintah dalam negara kesejahteraan diberi keleluasan untuk melakukan tindakan demi terwujudnya suatu kesejahteraan. Lebih lanjut menyebutkan bahwa

Dalam negara kesejahteraan, negara tidak membiarkan perekonomian berjalan tanpa kendali seperti dalam negara kapitalis liberal, tetapi juga tidak memonopoli kegiatan ekonomi seperti dalam negara sosialis.

Dalam hal ini pemerintah diberi keleluasaan untuk mensejahterakan masyarakat dengan caranya sendiri, artinya pemerintah boleh mengatur, membuat

dan menjalankan suatu program atau kegiatan yang dianggap dapat membuat masyarakatnya sejahtera. Selain merupakan kewajiban dari pemerintah sendiri, kesejahteraan ekonomi harus diupayakan juga oleh masyarakat, karena tidak selamanya pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Adapun bentuk upaya yang bisa dilakukan oleh seorang rakyat untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan ekonominya adalah melalui pengembangan usaha yang dimilikinya atau yang lebih disebut dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pemerintah dalam hal ini dapat membantu pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena hakikat dari demokrasi ekonomi itu sendiri adalah bagaimana menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi dalam setiap sendi kehidupannya. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Danial, (dalam <http://endangdanial.wordpress.com>. Diakses tanggal 20 November 2017) yang menyatakan bahwa

Pemberdayaan sebagai proses pembinaan memotivasi pada setiap warga negara yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan agar bangkit dan mandiri mampu mengembangkan perikehidupan berbasis kebangsaan dan komunitas. Setiap warga negara dituntut untuk berpartisipasi dalam produksi, distribusi dan konsumsi nasional sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Namun kondisi potensi warga negara Indonesia masih terbatas sehingga masih kurang produktif, walaupun diakui sumber produksi di beberapa daerah; tanah, gunung, perairan, laut di Indonesia cukup banyak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2015, hlm. 1) menemukan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak

Leli Rahmawati, 2018

KAJIAN TENTANG ECONOMIC CIVICS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM WIRUSAHA BARU JABAR (WUB) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat Tahun 2013, Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 14,3% pada tahun 2012 dimana 54,55% diantaranya merupakan hasil kontribusi dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2011-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, UMKM berhasil menyumbangkan Rp 495,54 triliun terhadap PDRB Non Migas Jawa Barat dengan laju pertumbuhan sebesar 10,95% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Usaha Besar menyumbangkan Rp 412,91 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 9,39% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM memang mutlak diperlukan, apalagi UMKM biasanya melakukan pengembangan ekonomi-ekonomi khas lokal seperti makanan olahan kicimpring, Cuanki dan lain sebagainya sehingga apabila hal-hal tersebut diberdayakan secara langsung akan membantu melestarikan warisan-warisan budaya bangsa.

Berikut data yang dihimpun oleh penulis berkenaan dengan jumlah UMKM yang ada di Jawa Barat.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Jawa Barat

UNIT USAHA	2011		2012		Pertumbuhan	
	Jumlah (unit)	Pangsa (%)	Jumlah (unit)	Pangsa (%)	(%)	
UMKM	8.750.914	99,98	9.166.503	99,97	415.589	4,75
Usaha Mikro	8.626.671	98,56	9.042.519	98,62	415.848	4,82
Usaha Kecil	116.062	1,32	115.749	1,26	-313	0,27
Usaha Menengah	8.181	0,09	8.235	0,08	54	0,66
Usaha Besar (UB)	1.728	0,01	1.853	0,02	125	7,23
Total	8.752.642	100	9.168.356	100	415.714	4,74

Sumber: Dinas KUMKM Jabar (2013)

Dengan banyaknya usaha atau Industri kecil yang tersebar di masyarakat, seyogyanya UMKM harus diberdayakan agar pembangunan ekonomi nasional

Leli Rahmawati, 2018

KAJIAN TENTANG ECONOMIC CIVICS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM WIRUSAHA BARU JABAR (WUB) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dapat sampai pada tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan menjamurnya berbagai UMKM tersebut, kesempatan untuk memberdayakan UMKM ini sangatlah terbuka lebar.

Adapun pengertian pemberdayaan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Masalah yang muncul berkenaan dengan kegiatan ekonomi warga negara berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan adalah bahwa masyarakat yang memiliki usaha atau industri kecil, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah mengalami kesulitan dalam mengembangkan kegiatan ekonominya, seperti kurangnya minat untuk berdagang, kesulitan modal, bagaimana membuat nama produk yang menarik, bagaimana membuat kemasan yang menarik, bagaimana agar produk yang dijual disukai oleh masyarakat, bagaimana pemasaran produk, kemana atau bagaimana mengajukan label halal dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut disinyalir karena terbatasnya informasi bagaimana mengembangkan ekonomi serta ketidaktahuan masyarakat akan strategi-strategi marketing dalam berjualan.

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti (2010) dengan berjudul "*Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Usaha Ekonomi Produktif (Studi di Kecamatan Kepanjen Sebagai Proyek Binaan BPM Kabupaten Kepanjen)*" menemukan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang usaha ekonomi produktif Kecamatan Kepanjen adalah peranan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai koordinator dan fasilitator, dapat dilihat dengan adanya regulasi yang jelas beserta komitmen pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama antar pelaku program mulai dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten serta antar Anggota Tim Koordinasi Kabupaten.

Dalam hal ini, peran sebuah lembaga dalam memberdayakan ekonomi warganegara mutlak diperlukan, sebagai koordinator dan fasilitator yang mengatur, mewadahi dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian lainya dilakukan oleh Kurniawati (2011) dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*” menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Machmud dan Sidharta (2013) dengan judul “*Model Kajian Pendekatan Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Sektor UMKM di Kota Bandung*”, menemukan bahwa perkembangan usaha kecil menengah (UKM) di Kota Bandung dapat dilakukan dengan pendekatan strategik dengan mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah (UKM) kemudian melakukan analisis terhadap keunggulan UMKM dan kesuksesan UMKM kemudian dilakukan analisis SWOT kelemahan, yang pada akhirnya dilakukannya suatu rumusan konsep pengembangan UMKM dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sehingga diperoleh strategi pengembangan UMKM dengan mengeluarkan suatu kebijakan mengenai perkembangan UMKM, program pengembangan UMKM, dan kegiatan pengembangan UMKM.

Dalam hal ini, Pembinaan ekonomi berbentuk sebuah program diperlukan oleh masyarakat, dimulai dari ibu rumah tangga, karyawan, bahkan mahasiswa sebagai upaya dalam menumbuhkembangkan serta memberdayakan keinginan untuk berwirausaha atau berdagang sehingga akan menciptakan masyarakat ataupun warganegara yang mandiri secara ekonomi bahkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang berada disekitarnya. Sebenarnya masyarakat atau warga negara banyak yang memiliki kegiatan usaha/dagang namun dalam hal

Leli Rahmawati, 2018

KAJIAN TENTANG ECONOMIC CIVICS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM WIRUSAHA BARU JABAR (WUB) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ini masyarakat kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Adapun jumlah pengusaha di Indonesia saat ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit dan Usaha Besar (UB) sebanyak 4.968 unit. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu tugas bagi pemerintah untuk membuat sebuah program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, Apalagi dipertengahan Tahun 2017 , dilansir dari surat kabar *Republika.co.id* diketahui bahwa sebanyak 1200-an orang telah kehilangan pekerjaan disebabkan ditutupnya sejumlah gerai ritel modern seperti 7 Eleven, Pasaraya Blok M, Ramayana bahkan sampai Lotus dan Debenhams. Secara tidak langsung, hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah pencari kerja menjadi bertambah dan pemerintah harus membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan itu dan daripada membuka lapangan kerja baru, lebih baik jika membuat mereka semua menjadi manusia yang mandiri secara ekonomi dengan cara membuat sebuah program pemberdayaan ekonomi.

Menurut Guntur, (2009,hlm.43) dasar perlunya pengembangan ekonomi dan upaya pemberdayaan ekonomi milik masyarakat menengah kebawah di Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Masalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan;
- 2) Relevansinya dengan proses desentralisasi kegiatan ekonomi;
- 3) Menunjang terciptanya integrasi pada sektor ekonomi yang lain;
- 4) Potensinya terhadap pencitraan dan perluasan kesempatan kerja;
- 5) Peranannya dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi karena industri berskala kecil umumnya diusahakan oleh pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang sangat rendah.

Pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat disampaikan juga oleh Sekjen PBNU HA. Helmy Faishal Zaini dalam Konferensi Internasional Pembangunan Islam yang di selenggarakan di Universitas Jember (22/9) yang dimuat dalam laman blog resmi PBNU “*NU Online*” yaitu

Ada tiga sektor yang bisa dijadikan konsen dalam mengembangkan ekonomi, yaitu kewirausahaan, ekonomi digital, serta pertanian yang meliputi peternakan, kalautan, dan perikanan. kunci kemajuan hari ini terletak pada pemberdayaan ekonomi warga. Warga harus didorong untuk berdaya secara ekonomi. Adapun dorongan itu dapat dibentuk dari level konsepsi sampai level praksis.

Leli Rahmawati, 2018

KAJIAN TENTANG ECONOMIC CIVICS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM WIRAUSAHA BARU JABAR (WUB) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan kepada pernyataan tersebut, penulis simpulkan bahwa dalam menyongsong perkembangan zaman yang semakin cepat atau dalam hal ini adalah globalisasi, pemberdayaan ekonomi warganegara mutlak diperlukan, sehingga akan tercipta warganegara atau masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang terberdayakan melalui tataran pemberian konsep-konsep pengembangan ekonomi sampai bagaimana menjadi eksekutor dalam mengembangkan perekonomian dilapangan serta yang paling penting adalah bagaimana mengubah *mindset* atau pandangan masyarakat bahwa berbisnis, berwirausaha ataupun berdagang bisa dilakukan serta dikembangkan ketika masyarakat itu memiliki ide, memiliki usaha serta memiliki semangat dalam berwirausaha.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang jelas adalah bagian dari Negara Republik Indonesia, secara konstitusional berkewajiban mengusahakan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya karena sudah menjadi salah satu tujuan nasional yang tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB). Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya tercapainya salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut senada dengan pendapat Nugroho (2003, hlm. 51) yang menyatakan bahwa “kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional”. Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sendiri merupakan salah satu program unggulan dari bapak gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Adanya Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) diharapkan dapat menjadi solusi dan jalan terang bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kegiatan usahanya sehingga dikemudian hari jumlah pengusaha yang ada di Jawa Barat terus meningkat dan secara tidak langsung akan membuka

lapangan-lapangan kerja baru dimasyarakat sehingga jumlah pengangguran atau pencari kerjapun akan berkurang dengan sendirinya.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **KAJIAN TENTANG *ECONOMIC CIVICS* MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM WIRUSAHA BARU JABAR (WUB) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA BARAT (Studi Deskriptif di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Jawa Barat).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Apa yang melandasi Pelaksanaan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) disebut sebagai Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Jawa Barat?
- 1.2.3 Bentuk pendekatan apa yang digunakan dalam pelaksanaan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
- 1.2.4 Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?
- 1.2.5 Upaya apa saja yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana Kajian Tentang *Economic Civics* melalui Implementasi Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Barat (Studi Deskriptif di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Jawa Barat)

Adapun tujuan Spesifik yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- 1.3.1 Memaparkan landasan dilaksanakannya Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Jawa Barat;
- 1.3.2 Menggambarkan mekanisme pelaksanaan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Jawa Barat;
- 1.3.3 Mengkaji pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai upaya pemberdayaan UMKM;
- 1.3.4 Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai upaya pemberdayaan UMKM;
- 1.3.5 Menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) sebagai upaya pemberdayaan UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya, adanya sebuah penelitian adalah bagaimana memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat, sehingga dikemudian hari penelitian tersebut menjadi pemecah masalah yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat ataupun studi keilmuan yang diteliti.

Adanya penelitian ini juga diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat baik berupa sumbangsih teoritis maupun sumbangsih dalam tataran praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Leli Rahmawati, 2018

KAJIAN TENTANG ECONOMIC CIVICS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM WIRAUSAHA BARU JABAR (WUB) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan referensi bagi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan PKn itu sendiri, khususnya bidang pengembangan *Economic Civics* karena permasalahan yang disajikan diatas sangat erat kaitannya dengan upaya negara dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta bagaimana peran masyarakat sendiri dalam membantu pemerintah menjalankan roda perekonomian sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, diantaranya :

1.4.2.1 Bagi Peneliti

- a. Menumbuhkan minat penelitian-penelitian selanjutnya, terutama berkenaan dengan program-program pemerintah dan masalah sosial di masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan dalam penelitian terutama penelitian mengenai Kajian tentang *Economic Civics* melalui Implementasi Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) Sebagai Upaya Pemberdayaan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Barat;
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.

1.4.2.2 Bagi UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Jawa Barat

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian evaluasi terhadap pelaksanaan program Wirausaha Baru Jabar (WUB) yang selama ini telah dijalankan;
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Wirausaha Baru Jabar (WUB);
- c. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program Wirausaha Baru Jabar (WUB) yang selama ini telah dijalankan;

- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi guna menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah perekonomian yang terjadi dimasyarakat;
- e. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkenaan dengan pengembangan kehidupan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat;
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai salah satu pertimbangan untuk menjadi seorang pengusaha;
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan program pemerintah dalam memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakatnya.

1.4.2.4 Bagi Mahasiswa

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memilih kegiatan atau program yang mampu mewadahi mahasiswa untuk berkembang;
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkenaan dengan peluang usaha yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi merupakan bagian yang memuat sistematika penulisan skripsi sesuai dengan bab, urutan penulisan dan hubungan atau keterkaitan antara bab satu dengan yang lainnya. Sistematika skripsi memuat penjelasan singkat mengenai isi dalam setiap bab pada skripsi ini. Adapun sistematika skripsi Kajian Tentang *Economic Civics* Melalui Implementasi Program Wirausaha Baru Jabar (WUB) Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Barat (Studi Deskriptif di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Jawa Barat) terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Didalamnya memuat latar belakang penelitian, yang berisi alasan mengapa peneliti memilih judul tersebut, dan berisi rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang didalamnya akan berisi arahan ke mana skripsi yang dibuat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Didalamnya berisi teori-teori dan materi pendukung yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalamnya memuat tatacara, langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Didalamnya memuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Didalamnya memuat kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan serta rekomendasi atau saran-saran dari peneliti kepada instansi-instansi terkait, masyarakat, mahasiswa dan lain-lain sebagainya.